

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Satu dari sejumlah upaya yang diimplementasikan oleh Negara Indonesia dalam hal mencapai cita-citanya ialah dengan melaksanakan pembangunan. Penciptaan warga yang merata serta makmur menurut Pancasila dan UUD 1945 wajib direalisasikan dengan pembangunan ekonomi nasional yang berlandaskan pada demokrasi ekonomi. Mengingat kemiskinan dan ketidakberdayaan yang dialami oleh masyarakat Indonesia, maka penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan mengambil langkah-langkah untuk memerangi kemiskinan.

Pemahaman akan kekurangan ekonomi yang dialami seseorang akan termanifestasi saat ia memperbandingkan gaya hidupnya dengan individu lain yang menikmati keadaan ekonomi yang lebih baik. Keadaan tidak mampu secara ekonomi merupakan salah satu permasalahan yang tak terelakkan dan sering kali terjadi tanpa diduga oleh individu.

Kemiskinan merupakan masalah multisektoral yang membutuhkan kerja sama dari pemerintah pusat hingga pemerintah setempat. Hanya jika pemerintah mengambil langkah-langkah dan mendukung rumah tangga berpenghasilan rendah, maka masalah kemiskinan dapat diatasi. Namun, keluarga miskin sering kali tidak diuntungkan oleh kebijakan yang dibuat. Oleh karena itu, kebijakan

yang ada saat ini justru memperburuk keadaan keluarga miskin dan bahkan dapat mendorong individu yang belum merasakan kesulitan finansial menjadi kesulitan finansial. Jadi, untuk menanggulangi hal ini secara efektif, harus ada rencana, kebijakan, strategi, dan arah yang jelas, serta mekanisme yang difokuskan untuk membantu keluarga yang tidak mampu (Sari, 2011:).

Oleh karena itu, keterlibatan semua pihak yang terkoordinasi dan komprehensif diperlukan untuk mengatasi masalah kemiskinan yang rumit. Oleh karena itu, diperlukan reformasi substansial dan struktural dalam memerangi kemiskinan. Poin pertama meliputi program bantuan dan jaminan sosial yang memberikan dukungan kepada keluarga dan masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan akses terhadap program-program yang dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka dan mengurangi beban hidup mereka. Poin kedua mencakup program pemberdayaan masyarakat, yang juga dikenal sebagai PNPM, yang bertujuan menginspirasi masyarakat agar dapat memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki untuk mengatasi kemiskinan; Selanjutnya, yang menjadi poin ketiga adalah program pendukung pertumbuhan dan pengembangan usaha mikro, dengan tujuan agar masyarakat yang kurang mampu dapat mengalami peningkatan ekonomi dapat meningkatkan pendapatan mereka. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) diwujudkan melalui penciptaan sistem, mekanisme program, dan proses, yang menawarkan dukungan untuk merangsang Upaya jangka panjang

dalam mengatasi kemiskinan melalui inisiatif dan inovasi yang dilakukan oleh masyarakat (Putri, 2020: 2).

Sebagai akibat dari ketidakmerataan distribusi pendapatan di dalam masyarakat, kemiskinan menjadi salah satu bentuk fenomena sosial yang diakibatkan oleh kesenjangan sosial. Secara ekonomi, salah satu cara untuk mengukur seberapa baik keadaan suatu masyarakat adalah dengan melihat perubahan tingkat kemiskinan di negara tersebut. Hasilnya, penurunan tingkat kemiskinan saat ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan masyarakat telah membaik (Aguswandi, 2015).

Pemerintah telah melaksanakan sejumlah program untuk menanggulangi kemiskinan demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, peran pemerintah memiliki signifikansi yang sangat besar. Jadi, inisiatif pemberdayaan masyarakat merupakan satu-satunya cara untuk mengurangi kemiskinan. Melalui berbagai inisiatif pemberdayaan, masyarakat didorong untuk mengembangkan kapasitasnya agar dapat berdiri di atas kedua kakinya sendiri, berdaya saing, dan mandiri. (Purnamasari, 2015:16-17).

Pemberdayaan masyarakat menjadi pendekatan yang efektif dalam mengatasi permasalahan kemiskinan, atau setidaknya mencegah timbulnya konsekuensi negatif dari kemiskinan seperti permukiman yang buruk, tingkat kriminalitas, dan praktik prostitusi (Huraerah, 2011:187).

Tujuan dasar dari pembangunan-kesejahteraan-dapat dicapai jika elemen kedaulatan ekonomi manajemen ekonomi yang benar mampu dipenuhi secara efektif. Jadi, untuk mendorong kondisi kesejahteraan bagi masyarakat dan negara, pertama-tama perlu dibangun kedaulatan ekonomi serta manajemen ekonomi yang baik. Jadi, topik tata kelola ekonomi merupakan langkah selanjutnya dalam mencapai kesejahteraan. Tata kelola ini sangat penting karena mempengaruhi bagaimana sebuah perekonomian harus dijalankan. Profesionalisme, transparansi, dan ketersediaan akses informasi bagi masyarakat umum diperlukan untuk tata kelola ekonomi yang baik (Beik dan Asyianti, 2016: 30-31).

Masyarakat dianggap makmur jika sebagian besar kebutuhan mereka tertutupi, kadangkala terdapat disparitas yang signifikan dari keinginan serta kapabilitas masyarakat dalam menutupi kebutuhan tersebut. Ajaran Islam secara umum mengenai kehidupan ini menjadi dasar bagi perspektif ekonomi Islam mengenai kesejahteraan. Singkatnya, ajaran Islam menganjurkan kesejahteraan itu sendiri: Untuk itu, tindakan terkoordinasi dan terkoordinasi dari semua pihak diperlukan untuk mengatasi masalah kemiskinan yang rumit. Oleh karena itu, diperlukan reformasi substansial dan struktural dalam memerangi kemiskinan (Putri, 2020: 2).

1. Kesejahteraan yang menyeluruh dan harmonis yang mempertimbangkan dimensi materiil dan spiritual, serta dimensi sosial dan individual. Dalam kepercayaan Islam, kondisi kekayaan finansial dan spiritual disebut sebagai *Fallah*, merujuk pada keagungan dan keberhasilan dalam kehidupan.

2. Kemakmuran di dunia dan akhirat sebab manusia menghuni baik dunia maupun akhirat (Riswah, 2019:6-7).

Berbagai inisiatif nasional telah diluncurkan dengan tujuan mengurangi kemiskinan, seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Inpres Desa Tertinggal (IDT). Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dari pemerintah Indonesia bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemerintah daerah sekaligus mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan. Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, dan PNPM Mandiri Kawasan Khusus dan Desa Tertinggal, keduanya diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2007 (Christanto, 2015: 119).

Program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) ialah salah satu dari sekian banyak inisiatif anti-kemiskinan yang dikembangkan pemerintah. Dengan memberikan bantuan keuangan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dan dengan demikian meningkatkan pendapatan masyarakat Rumah Tangga Miskin (RTM), pemerintah memberdayakan masyarakat. Pemerintah telah meluncurkan PNPM pada tahun 2007 dengan tujuan untuk meningkatkan status sosial ekonomi keluarga. Namun, sejak tahun 2014, program ini mengalami perubahan nama menjadi DPAM. DAPM adalah suatu dana yang terus bergulir yang berasal dari pemerintahan Presiden SBY. Hingga saat ini, program ini

masih berjalan dengan nama DAPM dan memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi keluarga.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) ialah forum keuangan non-bank yang berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mengimplementasikan inisiatif berbasis pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan. Kemudian, PNPM-MP juga dipraktekkan dengan mengkoordinasikan dan mengembangkan sistem, proses dan prosedur program, serta memberikan bantuan dan stimulasi dana untuk memberikan dukungan terhadap gagasan dan kegiatan inisiatif masyarakat dalam usaha penanggulangan kemiskinan dalam periode yang panjang (Jenawi, 2017:602).

PNPM adalah satu dari sejumlah inisiatif yang digunakan pemerintah untuk mengembangkan kualitas hidup di lingkungan sekitar dengan memberikan dukungan keuangan kepada warga sehingga mereka dapat mengembangkan bisnis mereka dan menciptakan lapangan kerja baru. Dalam rangka membantu lapisan ekonomi menengah ke bawah di sektor pertanian, industri, kelompok, dan badan usaha, PNPM Mandiri Perdesaan telah menetapkan pinjaman dana bergulir sebagai tujuan utamanya. Oleh karena itu, pinjaman dana bergulir PNPM Mandiri Perdesaan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan memberikan dukungan modal untuk membuat masyarakat lebih produktif dan dengan demikian meningkatkan pendapatannya, pemerintah memberdayakan masyarakat. Sebagai

hasilnya, upaya pemerintah untuk memberdayakan masyarakat mampu menumbuhkan taraf sosial ekonomi keluarga.

Satu dari sejumlah masyarakat di Desa Waemputtang Kec. Poleang Selatan Kab. Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara dengan jumlah penduduk 2.008 jiwa, 567 rumah, dan sebanyak 1.012 yang tergolong miskin adalah Desa Waemputtang, Kecamatan Poleang Selatan, Kabupaten Bombana. Pengamatan awal saya menunjukkan bahwa lebih dari 50% warga di desa ini tergolong prasejahtera, dan banyak warga yang mengalami kesulitan ekonomi. Desa Waemputtang memilih opsi pemberdayaan perempuan di mana ibu rumah tangga yang tergolong miskin berpartisipasi dalam mekanisme kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) untuk mempercepat penurunan angka keluarga pra-sejahtera. Melalui inisiatif ini, DAPM memberikan dukungan kepada lingkungan sekitar untuk pertumbuhan bisnis lokal dalam bentuk modal usaha. Di Desa Waemputtang, Kecamatan Poleang Selatan, pemberian bantuan modal usaha ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban setiap rumah tangga yang pada akhirnya akan berujung pada penurunan jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM).

"Pengaruh Program Simpan Pinjam Terhadap Kesejahteraan Anggota Kelompok SPP di UPK Mandiri Sejahtera Binangun Kabupaten Cilacap" adalah judul penelitian tahun 2016 oleh Rizki Linda Listia. Penelitian semacam ini bersifat kuantitatif. Menurut penelitian ini, mekanisme SPP di UPK Mandiri Sejahtera secara signifikan dan positif mempengaruhi kesejahteraan peserta SPP.

"Pengaruh Program Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan (P2MB) dalam Menunjang Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung)" adalah judul penelitian tahun 2017 oleh Adelia Larosa. Temuan dari penelitiannya membuktikan bahwa mekansime dari fasilitas yang didanaai oleh P2MB dan SPP memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat yang dibuktikan Dengan penyediaan modal usaha tambahan, menggalang partisipasi masyarakat dalam mengatasi kemiskinan, serta melibatkan masyarakat dalam upaya membangun kota yang lebih maju.

Penelitian yang berjudul "**Pengaruh Pelaksanaan Program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (studi kasus Desa Waemputtang Kecamatan Poleang Selatan Kabupaten Bombana)**" diputuskan untuk dilakukan oleh peneliti berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas.

## **1.2. Batasan Masalah**

Penggunaan batasan masalah membantu agar penelitian tetap berada pada jalur yang benar dan memudahkan dalam pembahasan mengenai dampak implementasi Program DPAM terhadap kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah masalah yang peneliti batasi:

1. Pelaksanaan program DPAM ialah satu-satunya informasi yang tercakup dalam ruang lingkup penelitian.



2. Informasi yang dimaksud adalah dampak dari implementasi program DPAM terhadap kesejahteraan masyarakat dan menggunakan dua variabel independen dan dependen.

### **1.3. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) terhadap kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam (studi kasus Desa Waemputtang Kec. Poleang Selatan Kab. Bombana) ?
2. Apakah pelaksanaan program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DPAM) berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat (studi kasus Desa Waemputtang Kec. Poleang Selatan Kab. Bombana) ?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DPAM) terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Waemputtang dalam perspektif ekonomi Islam.
2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat (studi kasus Desa Waemputtang Kec. Poleang Selatan Kab. Bombana)

### 1.5. Manfaat Penelitian

Secara alami, setiap investigasi akan menghasilkan dampak yang diinginkan untuk memberikan bantuan kepada para peneliti dan pihak lain yang memerlukan. Manfaat dari penelitian meliputi

#### 1.5.1. Secara teoritis

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengetahuan ilmiah yang ada dan meningkatkan pemahaman pembaca dan penulis mengenai kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.

#### 1.5.2. Secara praktis

##### a. Bagi Peneliti

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat menyumbangkan ide dan masukan mengenai proyek-proyek pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam bidang kesejahteraan masyarakat, bagi pihak-pihak yang berkepentingan, terutama masyarakat luas.

##### b. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Diharapkan penelitian lebih lanjut dalam bidang yang terkait dapat memanfaatkan temuan penelitian ini sebagai sumber data dan sumber referensi.

### 1.6. Definisi Operasional

Tujuan dari penggunaan definisi operasional adalah untuk mencegah kebingungan dan variasi dalam penafsiran terhadap frasa-frasa yang terdapat dalam judul proposal. Adapun definisi operasional

yang harus diperjelas adalah sebagai berikut sesuai dengan judul penelitian yaitu":

#### 1. Program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM)

Program SPP adalah inisiatif DPAM yang disebutkan dalam bagian ini. Layanan ini dalam banyak kasus, dimanfaatkan oleh ibu rumah tangga sebagai alat untuk mendukung keuangan keluarga mereka, terutama perempuan yang memegang peran sebagai ibu rumah tangga.

#### 2. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat ialah fenomena terpenuhinya semua keinginan seseorang, termasuk kebutuhan akan makanan dan pakaian, layanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau, serta terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani. Untuk memulai sebuah usaha di masyarakat dan menafkahi keluarga mereka, khususnya ibu rumah tangga memanfaatkan uang dari program DAPM sebagai wadah.

### 1.7. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam naskah ini akan diorganisir ke dalam beberapa bab, di mana setiap bab akan terdiri dari sub-bab dengan format sebagai berikut.:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan

sistematika pembahasan akan dibahas dalam bab pendahuluan ini.

## **BAB II LANDASAN TEORI**

Landasan teori, paradigma, dan hipotesis penelitian yang relevan diuraikan dalam bab ini

## **BAB III METODELOGI PENELITIAN**

Bab ini mencakup jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, alat penelitian, metode pengolahan data, dan analisis data.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memberikan gambaran umum mengenai setting penelitian, hasil penelitian, dan analisis data.

## **BAB V PENUTUP**

Bab yang berisi kesimpulan, saran dan limitasi penelitian.

